

RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

Jln. Raya Cijulang No. 248 Telp/Fax. (0265) 2640011 Cijulang 46394

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud undang-undang, disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun untuk jangka waktu 3 (Tiga) bulan. Khusus untuk RENJA Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran.

Lebih lanjut isi dari RENJA ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kabupaten Pangandaran, yang mana dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan dimasa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 5 Agustus 2021
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pangandaran



Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM
NIP. 19641116 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD	12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	
3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021	13
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah memberikan implikasi secara langsung terhadap semakin luasnya cakupan perencanaan daerah. Adanya peralihan yang bersifat desentralistik ini kian menegaskan kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lembaga yang melaksanakan kewenangan Daerah di bidang keuangan, pengelolaan aset dan pendapatan daerah dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga produk perencanaan yang dihasilkan mampu memenuhi tuntutan dan dinamika kehidupan masyarakat yang kian berkembang.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diatas, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2021.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah itu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja oleh tiap-tiap SKPD. Dalam rangka pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki makna/arti bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan, karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran dan ini sejalan dengan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak menghambat pencapaian tujuan-tujuan fiskal.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dilakukan dengan melihat kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan yang terbagi menjadi *common goals* yang merupakan kegiatan lintas sektor dan memerlukan sinergitas yang tinggi lintas SKPD, serta prioritas pembangunan *non common goals* yang merupakan kegiatan sektoral yang dikerjakan oleh SKPD secara mandiri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun



2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini juga mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2021, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan



- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten



- Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;



43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 80);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun 2021 . Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
- b. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- d. Menciptakan alokasi sumber daya pembangunan daerah secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, sebagai pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum



- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2021**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan tujuan, sasaran dan prioritas program dan kegiatan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan perlu dilaksanakan oleh BPKD sebagai institusi Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Evaluasi ini diawali dengan kegiatan pemantauan atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik melalui pengamatan lapangan maupun analisis terhadap laporan triwulan yang dalam hal ini evaluasi renja dilaksanakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021.

Evaluasi ini dilakukan terhadap keseluruhan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang berasal dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

Pada umumnya pencapaian realisasi keuangan maupun fisik belum mencapai target, hal tersebut disebabkan oleh beberapa mekanisme dan proses administrasi. Dengan demikian kondisi tersebut berdampak pada pencapaian/realisasi fisik serta keuangan masing-masing kegiatan.

Untuk kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD tahun 2021 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Gambaran lengkap dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021 tersebut disajikan dalam tabel T-C.29. dibawah ini sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
(Terlampir)



2.2 Permasalahan Yang Ada Pada SKPD

Adapun permasalahan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya sebagai berikut :

1. Optimalisasi PAD masih rendah.
2. Pencatatan Aset belum sesuai ketentuan.
3. Kemampuan tenaga penagihan masih rendah.
4. Terbatasnya maintenance yang berkelanjutan dalam optimalisasi kegiatan cetak masal.
5. Ketidakjelasan status penggunaan lahan tower antara pemilik dan pengguna yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran pajak bumi dan bangunan.
6. Sarana gedung yang terpisah-pisah mengganggu efektifitas koordinasi.
7. Harus mulai ada perencanaan pembangunan gedung.
8. Perlu dibangunnya sistem pengelolaan pajak daerah berbasis IT.
9. Belum ada SDM yang memiliki kompetensi sebagai auditor pajak, penilai pajak, penagih dan operator consul untuk jabatan fungsional.
10. Dengan adanya darurat pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap realisasi PAD dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Pangandaran pada penyusunan Perubahan APBD 2021.
11. Dengan adanya kondisi keuangan membawa konsekuensi adanya pemangkasan atau penundaan kegiatan.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2018. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini juga mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pendanaan untuk keseluruhan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersumber pada APBD Kabupaten Pangandaran.

Rencana kerja program dan kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut :



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	5.2	KEUANGAN					52.362.290.948	289.563.802.712	245.927.232.092	(43.636.570.619,62)		
	5.2.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.442.108.153	14.753.512.127	14.762.483.226	8.971.099,38		
	5.2.1.2,01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					23.866.750	94.231.500	74.455.500	(19.776.000,00)		
	5.2.1.2,01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan SDM NON PNS dalam perencanaan program dan kegiatan	Dokumen dan Orang	7	7	16.277.250	57.986.500	47.781.500,00	(10.205.000,00)		
	5.2.1.2,01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Dokumen	8	8	7.589.500	36.245.000	26.674.000,00	(9.571.000,00)		
	5.2.1.2,02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.560.945.989	11.759.782.651	11.743.552.650	(16.230.000,62)		
	5.2.1.2,02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji ASN yang terbayarkan	%	100	100	3.526.638.739	11.562.718.651	11.562.718.650,38	(0,62)		
	5.2.1.2,02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SDM Non PNS pengelolaan keuangan tiap bulan	Orang	1	1	12.527.250	53.700.000	41.450.000,00	(12.250.000,00)		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	8	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	11=(10-9)	12	13
	5.2.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	21.780.000	137.916.000	136.151.000,00	(1.765.000,00)		
	5.2.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran	Dokumen	1	1	-	5.448.000	3.233.000,00	(2.215.000,00)		
	5.2.1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9.298.000	43.435.000	34.000.000	(9.435.000,00)		
	5.2.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah SDM Non PNS pengelolaan barang daerah tiap bulan	orang	1	1	9.298.000	43.435.000	34.000.000,00	(9.435.000,00)		
	5.2.1.2.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					15.436.500	62.000.000	51.288.000	(10.712.000,00)		
	5.2.1.2.04.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah SDM Non PNS Pengelolaan pendapatan daerah tiap bulan	orang	2	2	15.436.500	62.000.000	51.288.000,00	(10.712.000,00)		
	5.2.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.653.000	197.067.625	187.795.625	(9.272.000,00)		
	5.2.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	155	155	-	139.727.625	139.727.625,00	-		
			Jumlah Pakaian yang Tersedia	Stel	155	155				-		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
			Jumlah orang yang mengikuti disiplin budaya kerja dan kebersamaan aparat	Orang	0	0				-		
	5.2.1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah SDM Non PNS Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	orang	2	2	20.653.000	57.340.000	48.068.000,00	(9.272.000,00)		
	5.2.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					191.078.000	662.482.879	605.958.879	(56.524.000,00)		
	5.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	Jenis	6	5	570.000	9.324.951	9.324.951,00	-		
	5.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang dibeli	Jenis	95	95	156.180.000	301.856.967	301.856.967,00	-		
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Jenis	35	35						
			Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Jenis	35	35					-	
	5.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang yang di cetak dan digandakan	Jenis	10	8	8.724.000	39.900.561	39.900.561,00	-		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
	5.2.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	Jenis	6	6	3.070.000	5.710.000	6.910.000	1.200.000,00		
	5.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Kali	250	100	22.534.000	305.690.400	247.966.400,00	(57.724.000,00)		
			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang diikuti	kali	0	0				-		
	5.2.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah					71.550.000	636.243.318	636.243.318	-		
	5.2.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli	Jenis	30	30	-	173.337.366	173.337.366,00	-		
	5.2.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang dibeli	Unit	17	17	-	262.905.952	262.905.952,00	-		
	5.2.1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang tersedia	unit	3	3	71.550.000	200.000.000	200.000.000,00	-		
	5.2.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah					363.324.201	798.338.754	943.699.754	145.361.000,00		
	5.2.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta	Lembar	500	200	300.000	6.790.000	5.590.000	(1.200.000,00)		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1
REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
			Jumlah dokumen terkirim									
	5.2.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Rekening	7	6	254.243.201	446.101.656	626.101.656,00	180.000.000,00		
			Jenis makanan dan minuman yang dibeli	Jenis	3	3						
			Jumlah SDM Keamanan setiap bulan	Orang	4	4						
			Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	Orang	4	4						
	5.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS dalam kegiatan teknis perkantoran tiap bulan	Orang	1	1	108.781.000	345.447.098	312.008.098	(33.439.000,00)		
			Jumlah SDM Pengemudi setiap bulan	Orang	1	1						
	5.2.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah					185.955.713	499.930.400	485.489.500	(14.440.900,00)		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
	5.2.1.2,09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin	Unit	60	60	50.231.713	209.250.400	209.809.500	559.100,00		
			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Unit	60	60				-		
	5.2.1.2,09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelur yang dipelihara	Jenis	10	0	-	0	0	-		
	5.2.1.2,09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	10	8	19.635.000	153.000.000	138.000.000	(15.000.000,00)		
	5.2.1.2,09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	7	7	116.089.000	137.680.000	137.680.000,00	-		
	5.2.2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					43.962.714.335	255.013.283.172	212.003.517.306	(43.009.765.866,00)		
	5.2.2.2,01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					1.334.888.250	5.770.599.750	5.751.299.550	(19.300.200,00)		
	5.2.2.2,01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA,PPAS	Dokumen	2	2	84.810.000	465.590.000	465.590.000,00	-		
	5.2.2.2,01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUPA, PPASP	Dokumen	2	2	83.400.000	466.060.000	466.060.000,00	-		
	5.2.2.2,01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di asistensi	SKPD	35	35	-	378.016.000	378.016.000,00	-		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
	5.2.2.2.01.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di asistensi	SKPD	35	35	85.200.000	388.990.000	388.990.000,00	-		
	5.2.2.2.01.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di asistensi	SKPD	35	35	-	389.590.000	389.590.000,00	-		
	5.2.2.2.01.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD yang di asistensi	SKPD	35	35	169.100.000	508.228.000	508.228.000,00	-		
5.2.2.2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	Raperbup,Perbup	2	2	-	798.308.000	798.308.000,00	-			
		Jumlah Raperda dan Perda Tentang APBD yang disusun	Raperda,Perda	2	2	-						
5.2.2.2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperbup dan PerbupPerubahan Penjabaran APBD yang disusun	Raperbup,Perbup	2	8	608.268.000	1.241.864.000	1.241.864.000,00	-			
		Jumlah Raperda dan Perda Tentang Perubahan APBD yang disusun	Raperda,Perda	2	2	-						
5.2.2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah SKPD Yang memenuhi Pengeolaan	SKPD	35	35	195.500.000	502.142.950	501.642.750,00	(500.200,00)			



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
			Anggaran Belanja Daerah									
	5.2.2.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	3	3	14.664.500	272.014.800	265.614.800,00	(6.400.000,00)		
	5.2.2.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah pengelola keuangan desa yang meningkatkan pemahamannya mengenai pengelolaan keuangan desa	Desa	186	186	93.945.750	238.916.000	226.516.000,00	(12.400.000,00)		
			Jumlah SKPD yang Terupdate dengan sistem	SKPD	35	35	-			-		
	5.2.2.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	0	0		120.880.000	120.880.000,00	-		
			Jumlah Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi	0	0				-		
	5.2.2.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					471.518.614	1.288.900.000	1.165.863.000	(123.037.000,00)		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan	
1	2	3	Indikator Kinerja 4	Satuan 5	Sebelum Perubahan 6	Setelah Perubahan 7	8	Sebelum Perubahan 9	Setelah Perubahan 10	11=(10-9)	12	13	
	5.2.2.2.02.1	Koordinasi danPengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	Dokumen	12	12	214.708.877	530.000.000	475.064.000,00	(54.936.000,00)			
			Jumlah Laporan Kas Umum Daerah Yang Disusun	Dokumen	12	12					-		
			Jumlah SKPD yang Dikelola	SKPD	35	35	45.225.250				(38.101.000,00)		
	5.2.2.2.02.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan penatausahaan belanja langsung	SKPD	35	35		175.000.000	136.899.000,00	-			
			Jumlah Dokumen Pengajuan Pencairan Hibah Bansos, Banku	Dokumen	8	8	160.345.987				-		
	5.2.2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Dana Perimbangan	SKPD	35	35		381.800.000	381.800.000,00	-			
	5.2.2.2.02.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah sistem Transaksi Non Tunai	Sistem	1	1	19.155.000	0	0	-			



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
	5.2.2.2.02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penunngutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	SP2D	4700	4700	427.074.500	202.100.000	172.100.000,00	(30.000.000,00)		
	5.2.2.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					796.111.900	2.459.430.250	2.448.791.750	(10.638.500,00)		
	5.2.2.2.03.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi	SKPD	9	9	-	235.000.000	235.000.000,00	-		
			Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi	SKPD	9	9						
			Jumlah skpd yang melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan skpd	skpd	35	35	5.269.000	250.319.250	239.680.750,00	(10.638.500,00)		
	5.2.2.2.03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya yang disusun	Dokumen	1	1	-	350.000.000	350.000.000,00	-		
	5.2.2.2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran										



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
	5.2.2.2.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang disusun	Dokumen	1	1	790.842.900	970.331.000	970.331.000,00	-		
			Jumlah Laporan/LKT yang Disusu	Laporan	4	4	-			-		
			Jumlah Raperbup	Raperbup	1	1		653.780.000	653.780.000,00	-		
	5.2.2.2.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun									
			Jumlah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Raperda	1	1				-		
			Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan daerah									
	5.2.2.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Orang	85	85	-	0	0	-		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang	85	85				-		
	5.2.2.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					41.031.039.321	244.242.683.422	201.490.156.256	(42.752.527.166,00)		
	5.2.2.2.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima bantuan keuangan	Desa	93	93	36.073.223.102	212.724.461.000	190.289.974.356,00	(22.434.486.644,00)		
	5.2.2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang digunakan	%	5	5	4.570.989.483	2.500.000.000	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00		
	5.2.2.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang menerima Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Desa	93	93	386.826.736	29.018.222.422	3.700.181.900,00	(25.318.040.522,00)		
	5.2.2.2.05.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					329.156.250	1.251.669.750	1.147.406.750	(104.263.000,00)		
	5.2.2.2.05.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hibah Bansos yang Disusun	Laporan	12	12	-	136.834.000	97.020.000	(39.814.000,00)		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
			Jumlah Tahapan Pengajuan	Kali	3	3				-		
	5.2.2.2.05.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi yang diupdate	Aplikasi	1	1	329.156.250	1.114.835.750	1.050.386.750,00	(64.449.000,00)		
	5.2.3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.332.110.580	11.049.896.027	13.696.937.424	2.647.041.397,00		
	5.2.3.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah					3.332.110.580	11.049.896.027	13.696.937.424	2.647.041.397,00		
			Jumlah bidang tanah yang tersedia Bagi Kepentingan Umum untuk pembangunan Fasilitas Pemerintahan Kabupaten Pangandaran	Bidang Tanah	1	5	2.922.247.880	7.517.247.100	10.397.246.000,00	2.879.998.900,00		
	5.2.3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	235	12					-	
	5.2.3.2.01.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penghapusan	Kali	3	3	-	82.296.003	59.416.000,00	(22.880.003,00)		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021	Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)		Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
	5.2.3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Yang diselesaikan	Laporan	1	1	12.894.000	172.749.910	169.499.910,00	(3.250.000,00)		
	5.2.3.2.01.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	Dokumen	1	1	15.994.000	968.555.678	750.328.178,00	(218.227.500,00)		
	5.2.3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Tanah yang disertifikatkan	Bidang Tanah	19	19	202.425.970	529.164.970	559.164.970,00	30.000.000,00		
			Jumlah kasus TPTGR yang ditangani	Kasus	2	5				-		
			Jumlah Kasus TPTGR yang ditangani	Kasus	2	2				-		
			Jumlah lahan (Tanah PT,KAJ) Tersedia	Lokasi	1	1	2.250.000			30.000.000,00		
	5.2.3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang beraih kepemilikan dari Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Pangandaran	Unit	58	58		1.198.494.516	1.228.494.516,00	-		
	5.2.3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi BMD	Laporan	37	37	39.109.500	277.280.000	228.680.000,00	(48.600.000,00)		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan				
1	2	3	Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
	5.2.3.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi Pengelolaan BMD yang di Update	aplikasi	1	1	5.660.000	154.107.850	154.107.850,00	-						
	5.2.3.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	Orang	70	70	135.235.750	150.000.000	150.000.000,00	-						
	5.2.4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					625.357.880	8.747.111.386	5.464.294.136	(3.282.817.250,00)						
	5.2.4.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					625.357.880	8.747.111.386	5.464.294.136	(3.282.817.250,00)						
	5.2.4.2.01.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	Aplikasi	3	3	85.106.000	332.490.000	401.114.000	68.624.000,00						
Jumlah SPPT yang didistribusikan			SPPT	465000	465000	-										
Jumlah Aplikasi Yang di Update			aplikasi	1	1	31.055.743	(100.000.000,00)									
	5.2.4.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Aplikasi Yang di Update	Aplikasi	1	1		2.013.489.845	1.913.489.845	-						
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pembinaan Terhadap Wajib Pajak	Wajib pajak	150	100	9.425.000	237.333.000	237.333.000,00	-						
	5.2.4.2.01.3															



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
5.2.4.2.01.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah alat sistem online pajak hotel dan restoran	Unit	50	50	7.050.000	399.999.866	399.999.866	-		
			Jumlah waktu pengelolaan pajak hotel dan restoran	Kali	12	12				-		
			Jumlah Aplikasi Pengelolaan PBB P2 dan jumlah printonix	Aplikasi, printonix	6	1	9.520.000			(23.040.000,00)		
5.2.4.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Tentang Data Objek pajak yang dihasilkan	Dokumen	1	1		190.000.000	166.960.000,00	-		
			Jumlah Data Obyek Pajak dan Subjek Pajak PBB P2	Objek Pajak	20000	20000	27.495.000			(3.120.836.950,00)		
			Jumlah Objek Pajak	Objek Pajak	10	10		3.148.331.950	27.495.000	-		
5.2.4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Cash Register	Unit	0	0				-		
5.2.4.2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHB)		Jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan	Dokumen	486	486	40.327.637	380.000.000	364.000.000,00	(16.000.000,00)		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
5.2.4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Yang Terilai	Objek pajak	25	25	17.620.000	200.425.150	310.450.900,00	110.025.750,00	-		
			Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pendapatan Asli Daerah	Dokumen	0	0						
5.2.4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak	Objek Pajak	5000	4000	132.952.500	354.418.675	323.354.625,00	(31.064.050,00)			
5.2.4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Hotel dan restoran	Objek Pajak	483	483	30.022.000	196.962.900	196.962.900,00	-			
			Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	Objek Pajak	500							
5.2.4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa	Laporan	93	93	193.341.000	832.291.000	668.165.000,00	(164.126.000,00)			
		Jumlah laporan data PBB-P2	Laporan	12	12							
		Jumlah Hasil Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	7300	7300							



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang 11=(10-9)	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
			Jumlah petugas Pemungutan PBB P2	Petugas Pemungut	465	465	37.820.000	151.969.000	151.969.000,00	-		
			Jumlah reklame yang diterbitkan	Reklame	345	345				-		
	5.2.4.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan Pembatalan, Keberatan, Pengurangan dan Mutasi Obyek Pajak	Dokumen	50	50				-		
			Jumlah Wajib Pajak Daerah yang Diperiksa	Wajib Pajak	60	60	3.623.000	309.400.000	303.000.000,00	(6.400.000,00)		
			Jumlah hasil Rekonsiliasi dan Evaluasi PBB P2	Laporan	93	0	-	0	0	-		
	5.2.4.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak peserta Sosialisasi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Wajib Pajak	150	0				-		



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021

TABEL V.1

REKAPITULASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

No	Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada PDA Perangkat Daerah tahun 2021)		Target Kinerja DPA Perangkat Daerah 2021		Realisasi Anggaran Pada Triwulan II / Semester I (Rp)	Anggaran pada DPA perangkat Daerah Tahun 2021 (Rp)		Bertambah / Berkurang	Sumber Dana	Catatan
			Indikator Kinerja	Satuan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13
			Jumlah Desa yang lunas dalam Pembayaran Pajak PBB-P2 dalam masa pajak	Desa	93	0				-		
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sistem pajak hotel dan restoran	Orang	0	0				-		
			Jumlah SDM Pengelola Pajak	Orang	0	0				-		



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2021 merupakan rujukan terhadap pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah yang tertuang dalam RENSTRA dan RKPD. Melalui perumusan Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan selain akan membantu meningkatkan kinerja aparatur di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah juga pada akhirnya dapat melahirkan produk pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas.

Pada tahun 2020 dengan mengacu pada nomenklatur Program dan Kegiatan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah mengagendakan 4 (empat) program untuk dilaksanakan yaitu :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan program tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah memperoleh dukungan baik Sumber Daya Manusia Aparatur pemerintahan di Badan Pengelola Keuangan Daerah maupun pendanaan yang berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Meskipun demikian, diakui pula bahwa untuk pencapaian Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah masih terdapat beberapa kendala antara lain : (1) kemampuan sumber aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah masih relatif terbatas dan (2) dukungan para pelaku pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam proses perencanaan dan koordinasi belum optimal.



Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kendala ini adalah peningkatan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Melalui koordinasi ini diharapkan akan tercipta suatu keserasian baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Parigi, 5 Agustus 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pangandaran



Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM
NIP. 19641116 199303 1 007

	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah SDM Non PNS Pengelolaan pendapatan daerah tiap bulan	1	orang	1	orang	1	orang	1	orang	100,00	2	orang	1	orang	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	465	Stel	0	Stel	0	Stel	0	Stel	0,00	155	Stel	0	Stel	0,00
		Jumlah Pakaian yang Tersedia	465	Stel	0	Stel	0	Stel	0	Stel	0,00	155	Stel	0	Stel	0,00
		Jumlah orang yang mengikuti disiplin budaya kerja dan kebersamaan aparaturnya	360	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0	Orang	0	Orang	0,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah SDM Non PNS Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2	orang	2	orang	2	orang	2	orang	100,00	2	orang	2	orang	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	6	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	6	Jenis	100,00	6	Jenis	6	Jenis	100,00
		Jenis ATK yang dibeli	100	Jenis	85,5	Jenis	95	Jenis	84	Jenis	88,42	95	Jenis	95	Jenis	95,00
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	105	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0,00	35	Jenis	0	Jenis	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	105	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0,00	35	Jenis	0	Jenis	0,00
		Jenis Barang yang di cetak dan digandakan	10	Jenis	5	Jenis	10	Jenis	10	Jenis	100,00	10	Jenis	10	Jenis	100,00
		Jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	6	Jenis	5	Jenis	6	Jenis	4	Jenis	66,67	6	Jenis	6	Jenis	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	750	Kali	79	Kali	250	Kali	79	Kali	31,60	250	Kali	158	Kali	21,07
		Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang diikuti	1080	kali	0	kali	0	kali	0	kali	0,00	0	kali	0	kali	0,00
		Jumlah mebelur yang dibeli	70	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0,00	30	Jenis	0	Jenis	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang dibeli	57	Unit	22	Unit	19	Unit	17	Unit	89,47	17	Unit	39	Unit	68,42
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang tersedia	3	unit	3	unit	3	unit	3	unit	100,00	3	unit	3	unit	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	1500	Lembar	536	Lembar	500	Lembar	234	Lembar	46,80	500	Lembar	770	Lembar	51,33

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	7	Rekening	4	Rekening	7	Rekening	4	Rekening	4	Rekening	57,14	7	Rekening	7	Rekening	100,00
	Penyediaan Jasa Relayan Umum Kantor	Jenis makanan dan minuman yang dibeli	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100,00	3	Jenis	3	Jenis	100,00
		Jumlah SDM Keamanan setiap bulan	4	Orang	3	Orang	4	Orang	3	Orang	3	Orang	75,00	4	Orang	3	Orang	75,00
		Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	4	Orang	3	Orang	4	Orang	4	Orang	4	Orang	100,00	4	Orang	4	Orang	100,00
		Jumlah SDM Non PNS dalam kegiatan teknis perkantoran tiap bulan	1	Orang	2	Orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang	100,00	1	Orang	1	Orang	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah SDM Pengemudi setiap bulan	1	Orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang	1	Orang	100,00	1	Orang	1	Orang	100,00
		Jumlah Kendaraan yang diservis dan benzin	60	Unit	41	Unit	60	Unit	37	Unit	60	Unit	61,67	60	Unit	60	Unit	100,00
		Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	60	Unit	49	Unit	60	Unit	133	Unit	60	Unit	221,67	60	Unit	182	Unit	303,33
		Jumlah mebelur yang dipelihara	10	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	0	Jenis	10	Jenis	0,00	10	Jenis	0	Jenis	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10	Jenis	6	Jenis	10	Jenis	6	Jenis	10	Jenis	60,00	10	Jenis	10	Jenis	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	7	Unit	6	Unit	7	Unit	6	Unit	7	Unit	85,71	7	Unit	6	Unit	85,71
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah																	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA,PPAS	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	2	Dokumen	4	Dokumen	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUPA, PPASP	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	2	Dokumen	4	Dokumen	100,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di asistensi	35	SKPD	35	SKPD	35	SKPD	35	SKPD	35	SKPD	100,00	35	SKPD	70	SKPD	200,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di asistensi		SKPD		SKPD	0	SKPD	0	SKPD	0	SKPD	0,00	35	SKPD	0	SKPD	0,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang di asistensi	35	SKPD	0	SKPD	0	SKPD	0	SKPD	0	SKPD	0,00	35	SKPD	0	SKPD	0,00
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD yang di asistensi		SKPD		SKPD	0	SKPD	0	SKPD	0	SKPD	0,00	35	SKPD	0	SKPD	0,00

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun	2	Raperbup,Perbup	1	Raperbup,Perbup	1	Raperbup,Perbup	1	100,00	2	Raperbup,Perbup	2	Raperbup,Perbup	100,00
		Jumlah Raperda dan Perda Tentang APBD yang disusun	2	Raperda,Perda	1	Raperda,Perda	1	Raperda,Perda	1	100,00	2	Raperda,Perda	2	Raperda,Perda	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperbup dan PerbupPerubahan Penjabaran APBD yang disusun	2	Raperbup,Perbup	12	Raperbup,Perbup	1	Raperbup,Perbup	12	1200,00	2	Raperbup,Perbup	12	Raperbup,Perbup	600,00
		Jumlah Raperda dan Perda Tentang Perubahan APBD yang disusun	2	Raperda,Perda	1	Raperda,Perda	1	Raperda,Perda	1	100,00	2	Raperda,Perda	2	Raperda,Perda	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah SKPD yang memahami Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah	35	SKPD	35	SKPD	35	SKPD	35	100,00	35	SKPD	35	SKPD	100,00
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah	3	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0,00	3	Dokumen	0	Dokumen	0,00
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah pengelola keuangan desa yang meningkat pemahamannya mengenai pengelolaan keuangan desa	186	Desa	93	Desa	93	Desa	93	100,00	186	Desa	186	Desa	100,00
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah SKPD yang Terupdate dengan sistem	35	SKPD	35	SKPD	35	SKPD	35	100,00	35	SKPD	35	SKPD	100,00
		Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	8	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0,00	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Aplikasi	0	Aplikasi	0	Aplikasi	0	0,00	0	Aplikasi	0	Aplikasi	0,00
	Koordinasi danPengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	24	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	100,00	12	Dokumen	24	Dokumen	100,00
		Jumlah Laporan Kas Umum Daerah Yang Disusun	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	100,00	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah SKPD yang Dikelola	35	SKPD	35	SKPD	35	SKPD	35	100,00	35	SKPD	35	SKPD	100,00
		jumlah waktu pelaksanaan penatausahaan belanja langsung	35	SKPD	35	SKPD	35	SKPD	35	100,00	35	SKPD	35	SKPD	100,00
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Pengajuan Pencairan Hibah Bansos, Banku	16	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	8	100,00	8	Dokumen	16	Dokumen	100,00
		Jumlah SKPD yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Dana Perimbangan	35	SKPD	0	SKPD	0	SKPD	0	0,00	35	SKPD	0	SKPD	0,00

	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah sistem Transaksi Non Tunai	1	Sistem	0	Sistem	0	Sistem	0	Sistem	0,00	1	Sistem	0	Sistem	0,00
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	9.300	SP2D	3.859,00	SP2D	4.600	SP2D	3.859	SP2D	83,89	4700	SP2D	7.718	SP2D	82,99
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah															
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	9 9	SKPD SKPD	0 9	SKPD SKPD	0 9	SKPD SKPD	0 9	SKPD SKPD	0,00 100,00	9 9	SKPD SKPD	0 9	SKPD SKPD	0,00 100,00
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan - LO dan Beban	Jumlah skpd yang melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan skpd	35	skpd	35	skpd	35	skpd	35	skpd	100,00	35	skpd	35	skpd	100,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya yang disusun	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	2	Dokumen	100,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang disusun	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	2	Dokumen	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan/KT yang Disusun Jumlah Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	4 2 2	Laporan Raperbup Raperda	4 1 1	Laporan Raperbup Raperda	4 1 1	Laporan Raperbup Raperda	4 1 1	Laporan Raperbup Raperda	100,00 100,00 100,00	4 1 1	Laporan Raperbup Raperda	4 2 2	Laporan Raperbup Raperda	100,00 100,00 100,00
		Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan pengelola keuangan daerah	85	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	85	Orang	0	Orang	0,00
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	85	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	85	Orang	0	Orang	0,00
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah															
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima bantuan keuangan	93	Desa	0	Desa	0	Desa	0	Desa	0,00	93	Desa	0	Desa	0,00

	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang digunakan	5	%	0	%	0	%	0	%	0,00	5	%	0	%	0,00
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang menerima Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	93	Desa	0	Desa	0	Desa	0	Desa	0,00	93	Desa	0	Desa	0,00
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah															
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hibah Bansos yang Disusun	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	12	Laporan	12	Laporan	100,00
		Jumlah Tahapan Pengujian	6	Kali	3	Kali	3	Kali	3	Kali	100,00	3	Kali	6	Kali	100,00
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi yang diupdate	2	Aplikasi	2	Aplikasi	1	Aplikasi	1	Aplikasi	100,00	1	Aplikasi	2	Aplikasi	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH															
	Pengelolaan Barang Milik Daerah															
		Jumlah bidang tanah yang tersedia Bagi Kepentingan Umum untuk pembangunan Fasilitas Pemerintahan Kabupaten Pangandaran														
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	260	Unit	257	Unit	260	Unit	257	Unit	98,85	235	Unit	235	Unit	90,38
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penghapusan	6	Kali	1	Kali	3	Kali	1	Kali	33,33	3	Kali	2	Kali	33,33
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang diselesaikan	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	1	Laporan	2	Laporan	100,00
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
		Jumlah Tanah yang disertifikatkan	120	Bidang Tanah	33	Bidang Tanah	60	Bidang Tanah	33	Bidang Tanah	55,00	19	Bidang Tanah	66	Bidang Tanah	55,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah kasus TPTGR yang ditangani	4	Kasus	1	Kasus	2	Kasus	1	Kasus	50,00	2	Kasus	2	Kasus	50,00
		Jumlah Kasus TPTGR yang ditangani	2	Kasus	0	Kasus	0	Kasus	0	Kasus	0,00	2	Kasus	0	Kasus	0,00
		Jumlah lahan (Tanah PT.KAL) Tersedia	2	Lokasi	1	Lokasi	1	Lokasi	1	Lokasi	100,00	1	Lokasi	2	Lokasi	100,00
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahhtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang beralih kepemilikan dari Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Pangandaran	116	Unit	20	Unit	70	Unit	20	Unit	28,57	58	Unit	40	Unit	34,48
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi BMD	37	Laporan	36	Laporan	37	Laporan	36	Laporan	97,30	37	Laporan	37	Laporan	100,00

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Aplikasi Pengelolaan BMD yang di Update	2	aplikasi	1	aplikasi	1	aplikasi	1	aplikasi	100,00	1	aplikasi	2	aplikasi	100,00
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	140	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	70	Orang	0	Orang	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah															
		Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	3	Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi	100,00	3	Aplikasi	6	Aplikasi	200,00
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah SPT yang didistribusikan	465.000	SPT	463.000,00	SPT	463.000,00	SPT	463.000,00	SPT	100,00	465000	SPT	926000	SPT	199,14
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Aplikasi Yang di Update	1	aplikasi	1	aplikasi	1	aplikasi	1	aplikasi	100,00	1	aplikasi	2	aplikasi	200,00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pembinaan Terhadap Wajib Pajak	80	Wajib pajak	0	Wajib pajak	0	Wajib pajak	0	Wajib pajak	0,00	150	Wajib pajak	0	Wajib pajak	0,00
		Jumlah alat sistem online pajak hotel dan restoran	12	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	50	Unit	0	Unit	0,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah waktu pengelolaan pajak hotel dan restoran	70	Kali	0	Kali	0	Kali	0	Kali	0,00	12	Kali	0	Kali	0,00
		Jumlah Aplikasi Pengelolaan PBB P2 dan jumlah printonix	1	Aplikasi, printonix	0	Aplikasi, printonix x	0	Aplikasi, printonix	0	Aplikasi, printonix	0,00	6	Aplikasi, printonix	0	Aplikasi, printonix	0,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tentang Data Objek pajak yang dihasilkan	6	Dokumen	0	Dokum en	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00
		Jumlah Data Obyek Pajak dan Subjek Pajak PBB P2	20.000	Objek Pajak	19378	Objek Pajak	18666	Objek Pajak	19378	Objek Pajak	103,81	20000	Objek Pajak	38756	Objek Pajak	193,78
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak	20	Objek Pajak	0	Objek Pajak	0	Objek Pajak	0	Objek Pajak	0,00	10	Objek Pajak	0	Objek Pajak	0,00
		Jumlah Cash Register	80	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0,00	0	Unit	0	Unit	0,00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan	1.053	Dokumen	1288	Dokum en	1053	Dokumen	1288	Dokumen	122,32	486	Dokumen	2576	Dokumen	244,63
		Jumlah Objek Pajak Yang Terilai	50	Objek pajak	25	Objek pajak	25	Objek pajak	25	Objek pajak	100,00	25	Objek pajak	50	Objek pajak	100,00
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pendapatan Asli Daerah	5	Dokumen	3	Dokume n	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	0	Dokumen	6	Dokumen	120,00
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak	11.700	Objek Pajak	5.700,00	Objek Pajak	5.700,00	Objek Pajak	5.700,00	Objek Pajak	100,00	5000	Objek Pajak	11400	Objek Pajak	97,44
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan	Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	500	Objek Pajak	500	Objek Pajak	500	Objek Pajak	500	Objek Pajak	100,00	483	Objek Pajak	1000	Objek Pajak	200,00

	Pajak Daerah	Jumlah Hotel dan restoran	483	Objek Pajak	0	Objek Pajak	0	Objek Pajak	0	Objek Pajak	0,00	500	Objek Pajak	0	Objek Pajak	0,00
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa	93	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	93	Laporan	0	Laporan	0,00
		Jumlah laporan data PBB-P2	12	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	12	Laporan	0	Laporan	0,00
		Jumlah Hasil Penagihan Pajak Daerah	7.300	Dokumen	7188	Dokumen	7000	Dokumen	7188	Dokumen	102,69	7300	Dokumen	14376	Dokumen	196,93
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah petugas Pemungutan PBB P2	465	Petugas Pemungut	0	Petugas Pemungut	0	Petugas Pemungut	0	Petugas Pemungut	0,00	465	Petugas Pemungut	0	Petugas Pemungut	0,00
		Jumlah reklame yang diterbitkan	105	Reklame	0	Reklame	0	Reklame	0	Reklame	0,00	345	Reklame	0	Reklame	0,00
		Jumlah permohonan Pembatalan, Keberatan, Pengurangan dan Mutasi Obyek Pajak	739	Dokumen	1120	Dokumen	394	Dokumen	1120	Dokumen	284,26	50	Dokumen	2240	Dokumen	303,11
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang Diperiksa	120	Wajib Pajak	60	Wajib Pajak	60	Wajib Pajak	60	Wajib Pajak	100,00	60	Wajib Pajak	120	Wajib Pajak	100,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah hasil Rekonsiliasi dan Evaluasi PBB P2	93	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	93	Laporan	0	Laporan	0,00
		Jumlah Wajib Pajak peserta Sosialisasi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	150	Wajib Pajak	0	Wajib Pajak	0	Wajib Pajak	0	Wajib Pajak	0,00	150	Wajib Pajak	0	Wajib Pajak	0,00
		Jumlah Desa yang lunas dalam Pembayaran Pajak PBB-P2 dalam masa pajak	93	Desa	0	Desa	0	Desa	0	Desa	0,00	93	Desa	0	Desa	0,00
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sistem pajak hotel dan restoran	200	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0	Orang	0	Orang	0,00
		Jumlah SDM Pengelola Pajak	4	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0,00	0	Orang	0	Orang	0,00